

RESPON KIAI TERHADAP KEBIJAKAN PEMERINTAH TENTANG PENYETARAAN MADRASAH DINIYAH DI SUMENEP

Ach. Syaiful

Dosen STIT Al Karimiyyah Beraji Gapura Sumenep

Abstract

Penelitian ini menyimpulkan bahwa adanya kebijakan politik pendidikan penguasa (pemerintah) memberikan nuansa tersendiri bagi pendidikan madrasah diniyah di pesantren berupa dampak positif dan negatif. Integrasi pendidikan agama dan umum di pesantren pada madrasah diniyah merupakan bentuk pemikiran inklusi para kiai pimpinan pesantren. Penyetaraan madrasah diniyah oleh pemerintah artinya memberikan peluang yang sama kepada lulusannya (sesuai ijazahnya) disamping mengembalikan nilai dan kepercayaan masyarakat terhadap dunia pendidikan pesantren. Dengan demikian, para kiai yang dijadikan obyek dalam penelitian ini sepakat dengan adanya penyetaraan madrasah diniyah dengan catatan pesantren diberikan otonomi dalam konteks tertentu, seperti pengembangan kurikulum dan bentuk evaluasinya (ujian).

Keywords: Respon KIAI, Kebijakan Pemerintah, Penyetaraan, Madrasah Diniyah

Pendahuluan

Pembahasan mengenai kiai di pondok pesantren bagaikan bola salju (*snow ball*) dan tidak pernah ada habisnya, mulai dari masalah kepemimpinan kiai di bidang intelektual (*'ilmiyyah*), spiritual (*rohāniyah*), sosial-kemasyarakatan

(*ijtimā'iyah*), organisasi (*jam'iyah*), administratif (*idāriyah*), pialang budaya (*cultural broker*), berperan sebagai tokoh (aktor) politik (*siyāsah*) hingga kepemimpinan kiai dalam pendidikan (*education*) yang secara spesifik dijadikan sebagai topik kajian dalam penelitian kali ini tentang respon kiai terhadap adanya kebijakan pemerintah pada lembaga pendidikan Islam dalam penyetaraan madrasah diniyah di dalam atau di lingkungan luar pondok pesantren.

Posisi kiai sebagai pengasuh dan pimpinan sentral di dalam pondok pesantren akan menentukan kemajuan lembaga pondok pesantren. Kemana arah perjalanan lembaga seperti kebijakan, otoritas, program, kurikulum dan pembangunan yang terkait dengan sarana dan prasarana belajar semuanya ditentukan oleh sang kiai sebagai pemilik pesantren. Ketika pesantren semuanya berada dalam pangkuan kiai, maka kemajuan pondok pesantren tergantung kepada karakter kepemimpinan seorang kiai sebagai pemangku jabatan sentral (pengasuh) di dalam lingkungan pondok pesantren. Dengan demikian, jika pesantren ingin maju dan berkembang kiai hendaknya mempunyai visi misi yang berorientasi terhadap perkembangan dan kemajuan lembaga sehingga pesantren menjadi lembaga pendidikan unggulan.

Masing-masing pondok pesantren memiliki ciri khas yang berbeda dalam keilmuan yang dijadikan mata pelajaran pokok. Kalau kiaiinya alim dalam ilmu-ilmu keagamaan seperti pengkajian kitab kuning, pemahaman terhadap ilmu alat seperti nahwu dan ṣarraf, maka akan melahirkan santri pandai membaca kitab kuning dan santri banyak yang berkompeten dalam bidang-bidang keagamaan. Dengan demikian, maka kurikulum di pesantren (sebagaimana juga pada madrasah diniyahnya) juga dilaksanakan secara sederhana sesuai dengan kemauan kiaiinya, termasuk pada metode pengajaran. Indikator yang dibuat juga tidak muluk-muluk, kiai berharap santrinya hanya bisa shalat dengan benar dan membaca al-Qur'an secara *tartīl* (faham ilmu tajwid). Metode pengajaran di pesantren yang diperaktekkan sejak lama adalah metode *bandongan*, *sorogan*, *muḥawarah*, *mudhakarrah*, hafalan, dan lainnya.

Lahirnya peraturan pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang pendidikan agama dan pendidikan keagamaan, tentunya memberikan wajah baru bagi pendidikan madrasah diniyah di pondok pesantren. Sebagai akibat dari peraturan pemerintah tersebut, maka jenjang pendidikan non-formal seperti madrasah diniyah di pondok pesantren kini mulai ada perubahan corak, yang dulunya tidak

mendapat perhatian dari pemerintah, kini mulai mendapat perhatian termasuk perhatian dalam bentuk bantuan dana.

Madrasah diniyah di pesantren yang sejak awal memang menyusun, pelaksanaan pembelajaran (KBM), dan evaluasi pembelajaran dilakukan sendiri secara mandiri oleh pesantren-pesantren, tampaknya dengan lahirnya PP. Nomor 55/2007, dalam konteks ini pemerintah, mulai memasukkan beberapa kurikulum juga untuk madrasah diniyah di pesantren. Bahkan materi pelajaran (mapel) juga akan terdapat mapel umum seperti IPA, IPS, Bahasa Indonesia dan Matematika. Komposisinya sekitar 80% untuk pendidikan agama, dan 20% untuk pendidikan umum. Selain itu, madrasah diniyah di pesantren juga mulai mendapat bantuan biaya: seperti BOS (Bantuan Operasional Sekolah), BOS buku, *block grant* dan beberapa bantuan lainnya.

Untuk semua itu, madrasah-madrasah diniyah yang ada di pondok pesantren hendaknya mengajukan permohonan ijin operasional kepada Kementerian Agama Republik Indonesia untuk mendapatkan beberapa bantuan diatas. Ketika madrasah diniyah mendapat ijin operasional, madrasah diniyah yang bersangkutan akan disetarakan dengan pendidikan umum, yakni *ulā* (setingkat SD), *wustā* (setingkat SMP), dan '*ulyā* (setingkat SMA) dan lulusannya pun mendapat ijazah resmi (formal) dari Negara.

Ketika madrasah diniyah disetarakan (layaknya pendidikan formal) sehingga beradah dibawah kontrol pemerintah, sudah barang tentu akan berbeda dengan pola pendidikan yang sejak awal memang tidak ada sangkut pautnya dengan pemerintah yang hanya dikontrol oleh kiai sebagai pengasuh dan bantu oleh ustadz.

Setiap kiai mempunyai cara pandang yang berbeda sebagai tokoh pendidikan dalam menyikapi perkembangan pendidikan Islam, termasuk madrasah diniyah yang merupakan hasil evolusi dari perkembangan model pendidikan salaf ke sistem klasikal (*madrasī*). Lain lagi respon kiai ketika pendidikan ada kaitannya dengan pemerintah, maka posisi kiai ada yang menjaga jarak ada pula kiai yang pro dengan kebijakan pemerintah. Semua itu berangkat dari pengalaman dan pengamatan kiai terhadap kondisi pendidikan secara umum, yang ketika pendidikan ada kaitannya dengan pemerintah, maka muncul problem yang akan dihadapi oleh dunia pendidikan, seperti kebijakan anggaran, kebijakan kurikulum hingga kebijakan evaluasi dan pelaporan.

Kiai yang menolak terhadap kebijakan penyetaraan madrasah diniyah bukan berarti kiai yang tidak menerima terhadap perubahan pendidikan, tetapi mengalami historis panjang, disamping dirinya mempunyai sejarah hitam dengan pemerintah pada masa Orde Baru ketika memberlakukan tidak adil dan tekanan-tekanan politik terhadap kiai. Selain itu juga, kiai bersangkutan tidak ingin madrasah diniyah menghadapi masalah tahunan layaknya lembaga pendidikan formal, seperti pada saat pelaksanaan Ujian Nasional yang sampai saat ini terus terjadi kontroversi disana-sini.

Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus (*case study*) dengan metode kualitatif. Data hasil penelitian ini secara keseluruhan diperoleh melalui metode wawancara (*interview*) kepada lima kiai pimpinan pondok pesantren yang mengelola madrasah diniyah. Dari hasil kajian perspektif teori dan temuan data di lapangan, peneliti menganalisis dengan menggunakan metode deskriptif, kesimpulannya melalui teknik analisis dengan pola deduktif dan hermeneutik.

KIAI dan Pendidikan Pesantren

Diskursus tentang kiai sepertinya tidak akan pernah habisnya. Kiai pesantren sebagai pemegang otoritas keagamaan, selalu ditempatkan pada posisi yang sangat terhormat, sehingga ia mampu mempengaruhi dan menggerakkan aksi sosial para pengikutnya. Namun hal demikian itu bisa terjadi evolusi oleh perubahan waktu. Pengaruh kiai kadangkala menjadi tidak bermakna ketika otoritas ke-kiai-an oleh masyarakat dianggap telah keluar dari *maqām* sebagai kiai. Kiai mengambil peran lain, misalnya ketika dirinya mencoba memasuki dunia politik praktis. Sehingga keberadaan kiai yang sejak dulu cenderung ber-vis-a-vis dengan pemerintah, kini, kebijakan birokrasi itu dipegang para kiai.

Tulisan ini tidak dimaksudkan untuk mengusung topik tentang keterlibatan kiai dalam politik praktis, melainkan untuk memotret dinamika pendidikan pesantren yang dimotori oleh seorang kiai ditengah modernisasi pendidikan. Kongkritnya, yang menjadi diskursus dalam penelitian ini adalah bagaimana sesosok kiai dalam pondok pesantren sebagai *filter* atas segala informasi baru yang masuk ke dalam pesantren sehingga mampu menyikapi, misalnya adanya

pembaharuan model pendidikan dari model *salafiyyah* ke sistem *madras̃* dengan adanya madrasah diniyah di pesantren.

Tema tentang respon kiai dalam beberapa aspek sudah barang tentu banyak dilakukan oleh para penulis, peneliti, pemerhati dan banyak akademisi sebelumnya. Misalnya respon kiai terhadap kebijakan pemerintah akibat adanya tekanan politik, respon kiai terhadap masuknya budaya baru, krisis ekonomi, respon terhadap munculnya kepercayaan, paham, aliran dalam beragama dan lain sebagainya. Melihat saking luasnya tema tentang respon kiai pesantren terhadap beberapa isu dan persoalan yang berkembang di tengah-tengah masyarakat.

Istilah respon dalam kamus populer bahasa Indonesia mempunyai arti reaksi terhadap rangsangan, tanggapan; jawaban. *Pertama*, respon mempunyai makna reaksi. Manusia sebagai makhluk hidup yang mempunyai ciri khusus, seperti bernafas, bergerak dan peka terhadap rangsang dan lainnya, maka ketika mendapatkan rangsangan berupa hal yang menjadi kesenangan terhadap dirinya, secara reflek, tanpa sadar, seseorang itu akan berupaya untuk mendapatkan apa yang telah diinginkan. Dalam konteks ini, arti respon lebih kepada bagaimana apa yang ia kehendaki bisa tercapai (*like*). Artinya, ada stimulus terlebih dahulu yang mengakibatkan muncul adanya sebuah kehendak (stimulus-respon).

Kedua, respon yang mempunyai pengertian tanggapan atau jawaban juga mempunyai maksud perlawanan. Secara substantif juga hampir sama dengan yang pertama, hanya saja kalau makna respon yang pertama lebih kepada tidak adanya konflik dengan adanya stimulus, sementara yang kedua lebih kepada perlawanan alias tidak sependapat.

Respon yang kedua tersebut bisa dikatakan sebagai tanggapan terhadap segala sesuatu yang muncul, seperti kebijakan pemerintah atau adanya budaya baru yang berkembang di masyarakat. Selanjutnya, respon juga bisa diartikan sebagai perlawanan sebagaimana dua permasalahan diatas (adanya kebijakan atau budaya). Istilah ini digunakan oleh penulis sebagai cermin terhadap adanya beberapa sikap yang dilakukan oleh kiai-kiai pondok pesantren terhadap kebijakan – untuk tidak mengatakan intervensi – pemerintah kepada kurikulum pondok pesantren tentang penyetaraan madrasah diniyah dengan lembaga pendidikan formal lainnya.

Objek Penelitian

Melacak akar sejarah mengenai tanggal berapapa, bulan apa dan tahun berapa tentang berdirinya suatu pondok pesantren pada daerah tertentu seperti sulit untuk ditemukan data yang valid. Apalagi pelaku sejarah (pendiri/pengasuh) telah meninggal dunia. Karena berdirinya pondok pesantren zaman dulu (memang) tanpa rencana dari seorang kiai atau ulama. Tetapi hanya berangkat dari sebuah niat tulus dan ikhlas untuk mengembangkan ilmunya yang didapat selama menempuh pendidikan (berguru) keada salah satu ulama kemudian pulang ke daerahnya.

Sejarah berdirinya pondok pesantren biasanya tercatat setelah mengalami perkembangan dengan mendirikan lembaga pendidikan sistem klasikal (*madrasā*), seperti mendirikan madrasah formal atau madrasah diniyah (non-formal). Dengan diresmikannya lembaga tersebut maka dianggap sebagai tahun berdirinya pondok pesantren dimaksud. Padahal sebelumnya ada hal panjang yang melatar belakangi sejarah berdirinya pondok pesantren.

Penelitian ini akan dilakukan secara khusus (melakukan *interview*) pada kiai-kiai pimpinan pondok pesantren di: Nasy'atul Muta'allimin (NASA) Kampong Battangan, Al-Munthaha Kampong Battangan, Hidayatul Muttaqin Pangabesen, Al-Hasani Kampong Dik-Kodik, Al-'Usmani Kampong Sema-Lambicabbi. Alasan dipilihnya lima pesantren tersebut sebagai objek, karena menjadi ikon pesantren di desa Gapura Timur.

Hasil Penelitian dan Simpulan

Adanya kebijakan pemerintah terhadap lembaga pendidikan Islam, seperti pada madrasah diniyah di pondok pesantren akan memberikan nilai tersendiri yang tidak dapat dipungkiri lagi, yakni dampak positif dan negatif terhadap keberlangsungan pendidikan madrasah diniyah. Dampak positif dari kebijakan itu, madrasah diniyah yang hanya dilakukan dengan sederhana sesuai dengan keinginan lembaga, kini sudah mulai menerapkan prinsip-prinsip manajemen dalam praktek kependidikan. Misalnya membuat perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), pengarahan (*actuating*) dan evaluasi (*controlling*). Selain itu, kepemimpinan kiai di pesantren dulunya dikenal dengan otoriter dan tertutup, kini juga telah menerapkan kolektif-partisipatoris.

Dampak negatif yang dirasakan oleh kiai pimpinan madrasah diniyah di pesantren sebagai konsekuensi logis dari kebijakan pemerintah dalam dunia pendidikan Islam adalah membuat lembaga tidak produktif. Hal itu bisa disebabkan oleh ketidaksiapan Sumber Daya Manusia yang ada dalam lembaga. Lemahnya SDM akan berakibat terhadap lambatnya proses kependidikan dalam suatu lembaga. Sehingga kebijakan pemerintah yang sangat administratif dan membelenggu itu dianggap sebagai suatu proses untuk menutup ruang kreasi dan kemandirian pada lembaga pendidikan Islam.

Selain dari tersebut diatas, lembaga pendidikan Islam juga merasakan akan mulai menipis nilai-nilai, ciri khas (karakter) dari madrasah diniyah yang ada di pesantren. Sejak dulu madrasah diniyah dilaksanakan dengan konsep sederhana ala pesantren, kini sudah mulai ketergantungan dengan pemerintah. Bahkan sudah mulai berharap bisa mendapat bantuan dari pemerintah. Maka penanaman nilai-nilai pesantren yang diajarkan pada madrasah diniyah untuk menciptakan santri – yang menurut Al-Ghazali – *ayyakūna ‘āliman, ‘ābidan, zāhidan, wārī’an, ya’rif maṣalih al-khālq* sudah mulai hilang dari aktivitas kegiatan para santri dan ustadz di lingkungan pesantren. Kondisi demikian sudah dirasakan oleh kiai saat ini

Secara umum, penelitian ini menyimpulkan bahwa adanya kebijakan politik pendidikan penguasa (pemerintah) memberikan nuansa tersendiri bagi pendidikan madrasah diniyah di pesantren berupa dampak positif dan negatif. Integrasi pendidikan agama dan umum di pesantren pada madrasah diniyah merupakan bentuk pemikiran inklusi para kiai pimpinan pesantren. Penyetaraan madrasah diniyah oleh pemerintah artinya memberikan peluang yang sama kepada lulusannya (sesuai ijazahnya) disamping mengembalikan nilai dan kepercayaan masyarakat terhadap dunia pendidikan pesantren. Dengan demikian, para kiai yang dijadikan obyek dalam penelitian ini sepakat dengan adanya penyetaraan madrasah diniyah dengan catatan pesantren diberikan otonomi dalam konteks tertentu, seperti pengembangan kurikulum dan bentuk evaluasinya (ujian).

Ach. Syaiful